

## FILSAFAT RASIONALISME SEBAGAI DASAR BAGI PEMBENTUKAN WARGA NEGARA YANG KRITIS DAN BERETIKA

Chris Apandie<sup>1\*</sup>, Zulkarnain<sup>2</sup>, Silvia Rahmelia<sup>3</sup>, Ahmad<sup>4</sup>

<sup>1,3</sup>Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

<sup>2</sup>Politeknik Negeri Balikpapan

<sup>4</sup>Universitas Negeri Yogyakarta

Email: <sup>1</sup>capandie@gmail.com\*, <sup>2</sup>zulkarnain@poltekba.ac.id, <sup>3</sup>Silviarahmelia@gmail.com,

<sup>4</sup>Ahmad.2025@student.uny.ac.id

### Abstract

*Rationalist Philosophy as a Basis for Critical and Ethical Citizenship in Civic Education. This article examines philosophical rationalism as a conceptual foundation for the formation of critical and ethical citizens within Civic Education. Rationalism positions reason as the primary source of knowledge and emphasizes logical reasoning, critical reflection and ethical justification in public life. This study employs a qualitative approach using a philosophical literature review of key rationalist works and relevant Civic Education literature. Data are analyzed through conceptual and hermeneutic analysis to explore the historical development, core principles and educational relevance of rationalism. The findings indicate that rationalist philosophy contributes significantly to the development of critical thinking, moral reasoning, intellectual autonomy and deliberative competence among citizens. In the context of misinformation and post-truth challenges, rationalism provides a strong philosophical foundation for strengthening democratic and ethically oriented Civic Education.*

**Keywords:** Civic Education, Critical Citizenship, Public Ethics, Rationalism

### Abstrak

Artikel ini mengkaji filsafat rasionalisme sebagai dasar konseptual pembentukan warga negara yang kritis dan beretika dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Rasionalisme menempatkan akal sebagai sumber utama pengetahuan dan menekankan pentingnya penalaran logis, refleksi kritis, serta justifikasi etis dalam kehidupan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian filosofis berbasis studi pustaka terhadap karya-karya utama rasionalisme dan literatur Pendidikan Kewarganegaraan. Analisis dilakukan secara konseptual dan hermeneutik untuk menelusuri sejarah, prinsip-prinsip dasar, serta relevansi rasionalisme dalam konteks pendidikan kewargaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa rasionalisme memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran moral, otonomi intelektual dan kecakapan deliberatif warga negara. Di tengah tantangan disinformasi dan fenomena post-truth, rasionalisme memberikan landasan filosofis yang kuat bagi penguatan Pendidikan Kewarganegaraan yang demokratis dan berorientasi pada etika publik.

**Kata kunci:** Etika publik, Pendidikan Kewarganegaraan, Rasionalisme, Warga Negara Kritis

## A. Pendahuluan

Pendahuluan mencakup latar belakang dari isu atau permasalahan serta urgensi, rasionalisasi dan tujuan dari penelitian (yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang lain). Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika ada) dapat dimasukkan dalam bagian ini. Perkembangan filsafat rasionalisme tidak dapat dilepaskan dari pergulatan panjang manusia dalam memahami kebenaran. Pada masa ketika pemikiran ditentukan oleh tradisi dan otoritas teologis, ruang bagi kebebasan bertanya dan menguji gagasan sangat terbatas. Situasi itu memunculkan keinginan untuk menata kembali cara manusia memperoleh pengetahuan bahwa kebenaran tidak hanya didasarkan pada warisan keyakinan, tetapi pada penalaran yang dapat diuji. Rasionalisme lahir dari dorongan tersebut, yakni menempatkan akal sebagai fondasi utama bagi proses memahami realitas. Pemikiran ini dipandang oleh banyak filsuf modern sebagai titik balik perkembangan intelektual Barat karena membuka jalan bagi pola pengetahuan yang disusun berdasarkan argumentasi kritis, bukan sekadar menerima tradisi sebagai sesuatu yang final.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya perdebatan filosofis yang hidup antara aliran rasionalisme dan empirisme, yang menjadi ciri khas pemikiran modern. Rasionalisme modern yang diprakarsai Descartes dikontraskan dengan Empirisme radikal yang dikembangkan oleh Francis Bacon (1561-1626), George Berkeley (1685-1753) dan David Hume (1711-1776). Perdebatan ini tidak hanya terjadi di bidang epistemologi tetapi juga memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan modern, termasuk fisika dan matematika. Dalam konteks ini, rasionalisme menempatkan penalaran deduktif sebagai metode utama

untuk mencapai kebenaran, berbeda dengan empirisme yang mengandalkan penalaran induktif berbasis pengalaman inderawi.

Perkembangan filsafat rasionalisme terus berlanjut hingga abad ke-20 dan ke-21, dengan pengaruhnya yang signifikan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Dunia pandangan rasional telah menjadi tulang punggung bagi sebagian besar sains dan filsafat Barat yang menembus berbagai bidang penyelidikan, mulai dari ilmu hayati, ilmu fisika, seni dan humaniora, hingga bidang komputer sains. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, prinsip-prinsip rasionalisme memiliki relevansi yang sangat penting karena menekankan kemampuan berpikir kritis, penalaran logis dan pengambilan keputusan berbasis alasan yang kuat kualitas yang sangat dibutuhkan dalam membentuk warga negara yang kritis dan beretika (Muhammad Bahar and Teng, 2016).

Dalam era informasi seperti sekarang, di mana disinformasi dan hoaks mudah menyebar, kemampuan berpikir rasional menjadi semakin krusial. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan tidak boleh diterima begitu saja tanpa melalui proses penalaran yang kritis dan logis. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang mampu berpikir kritis, menghargai kebenaran dan bertindak beretika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemahaman mendalam tentang filsafat rasionalisme dan penerapannya dalam konteks pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti polarisasi sosial, penyebaran informasi palsu, dan degradasi nilai-nilai demokratis. Dengan memahami sejarah, tokoh-tokoh, jenis-

jenis, dan prinsip-prinsip utama rasionalisme, kita dapat mengidentifikasi titik temu yang relevan antara filsafat ini dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang kritis dan beretika.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis titik temu antara prinsip-prinsip rasionalisme dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang kritis dan beretika, dengan mempertimbangkan relevansinya dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini. Namun sebelumnya akan dideskripsikan juga sejarah perkembangan aliran filsafat rasionalisme hingga prinsip-prinsip utama yang mendasari pemikiran rasionalisme.

## B. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian filosofis berbasis studi pustaka (*philosophical literature review*). Metode ini dipilih karena fokus kajian tidak diarahkan pada pengukuran empiris atau pengujian hipotesis, melainkan pada analisis konseptual dan reflektif terhadap filsafat rasionalisme serta relevansinya bagi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Sumber data penelitian terdiri atas literatur primer dan sekunder. Literatur primer mencakup karya-karya utama filsafat rasionalisme dari tokoh-tokoh kunci seperti René Descartes, Baruch Spinoza dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Literatur sekunder meliputi buku filsafat, jurnal ilmiah bereputasi, serta publikasi akademik yang membahas rasionalisme, etika publik, pemikiran kritis dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, dengan kriteria seleksi meliputi relevansi konseptual, kredibilitas akademik dan kontribusi terhadap pembahasan kewarganegaraan kritis dan etis. Analisis

data dilakukan menggunakan analisis konseptual dan hermeneutik, yaitu dengan menafsirkan gagasan-gagasan inti rasionalisme, mengkaji struktur argumennya, serta mengaitkannya dengan tujuan dan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan.

Tahapan analisis meliputi: (1) penelusuran sejarah dan perkembangan rasionalisme; (2) identifikasi prinsip-prinsip dasar rasionalisme; dan (3) sintesis konseptual untuk merumuskan relevansi rasionalisme sebagai dasar pembentukan warga negara yang kritis dan beretika. Keabsahan kajian dijaga melalui konsistensi logis argumentasi, keterlacakan sumber rujukan, serta ketepatan interpretasi filosofis.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Prinsip Umum Rasionalisme

Rasionalisme sebagai aliran epistemologi memiliki akar panjang yang dapat ditelusuri sejak filsafat Yunani kuno melalui konsep logos yang diperkenalkan oleh Herakleitos, dikembangkan oleh Plato dan disistematisasi oleh Aristoteles. Para filsuf ini melihat bahwa realitas memiliki struktur rasional yang dapat dipahami melalui akal, bukan semata pengalaman inderawi. Pada era Abad Pertengahan, pemikiran rasional Yunani mengalami transformasi ketika dipadukan dengan teologi Kristen melalui tradisi skolastik. Meskipun demikian, rasionalitas masih berada di bawah otoritas teologis sehingga belum memperoleh otonomi penuh sebagai sumber pengetahuan. Pergeseran menuju rasionalisme modern mulai terbentuk menjelang Renaissance, ketika kritik terhadap dogma gereja dan kebangkitan kembali nalar klasik membuka ruang bagi lahirnya epistemologi baru yang menempatkan akal sebagai pusat pengetahuan (Kretzmann & Stump, 2018; Shields, 2020).

Rasionalisme mencapai bentuk modernnya pada abad ke-17 melalui karya-karya René Descartes yang menegaskan akal sebagai fondasi epistemologi melalui metode keraguan sistematis dan formulasi *cogito ergo sum*. Descartes menggeser sumber otoritas pengetahuan dari tradisi religius menuju subjektivitas rasional, yang kemudian menjadi dasar bagi filsafat dan sains modern. Pemikirannya dilanjutkan dan diperdalam oleh Baruch Spinoza yang mengembangkan sistem metafisika monistik berbasis deduksi logis, serta Gottfried Wilhelm Leibniz yang menyempurnakan rasionalisme melalui prinsip *sufficient reason* dan metafisika monad. Ketiganya menciptakan struktur rasionalisme yang meyakini bahwa akal manusia mampu menemukan kebenaran universal melalui penalaran deduktif yang koheren (Hatfield, 2022; Linsky, 2021).

Pada masa Pencerahan abad ke-18, rasionalisme menjadi fondasi intelektual bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sekularisme, dan sistem politik modern. Rasionalitas digunakan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari ketergantungan pada otoritas tradisional dan dogmatisme. Paradigma ini mendorong lahirnya metode ilmiah dan memperkuat keyakinan bahwa dunia tunduk pada hukum-hukum rasional yang dapat dijelaskan secara objektif. Pengaruh rasionalisme tidak hanya dirasakan dalam filsafat dan sains, tetapi juga dalam perumusan prinsip negara hukum, perkembangan birokrasi modern, serta lahirnya gagasan demokrasi yang menekankan kemampuan manusia untuk berpikir dan bertindak berdasarkan alasan yang rasional (Horvath, Fernandes, and Idiart, 2023).

Memasuki abad ke-20, rasionalisme menghadapi kritik tajam dari berbagai aliran seperti fenomenologi, eksistensialisme, posmodernisme dan

teori kritis. Nietzsche mempertanyakan klaim universalitas rasionalitas, Heidegger menilai bahwa rasionalisme mengaburkan pemahaman ontologis tentang keberadaan, sedangkan Foucault menunjukkan bagaimana rasionalitas dapat dipakai sebagai alat kekuasaan dalam struktur sosial. Kritik ini tidak menghancurkan rasionalisme, tetapi memaksanya berevolusi. Jürgen Habermas, misalnya, tidak menolak rasionalisme melainkan merekonstruksinya menjadi “rasionalitas komunikatif” yang menekankan dialog, argumentasi publik dan konsensus etis sebagai dasar tindakan sosial (Dreyfus and Rabinow, 2021; Habermas, 2019).

Pada era kontemporer, terutama dalam situasi “post-truth” yang ditandai oleh maraknya hoaks, polarisasi politik dan melemahnya otoritas fakta, rasionalisme kembali memperoleh relevansi sebagai fondasi bagi literasi kritis dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kemampuan berpikir rasional tetap menjadi salah satu kompetensi utama yang dibutuhkan masyarakat demokratis dalam merespons kompleksitas sosial dan teknologi modern (Bialystok, 2021). Dengan demikian, perjalanan historis rasionalisme memperlihatkan transformasi berkelanjutan dari logos Yunani kuno, revolusi epistemologi modern, kritik posstrukturalis, hingga rekonstruksi rasionalitas di era digital yang seluruhnya menegaskan posisi akal sebagai instrumen esensial bagi peradaban manusia.

Prinsip dasar rasionalisme bertumpu pada keyakinan bahwa akal memiliki posisi paling menentukan dalam proses memperoleh pengetahuan. Dalam tradisi ini, berpikir bukan sekadar aktivitas mental, melainkan mekanisme utama yang memberi struktur dan arah bagi pengetahuan manusia. Pengalaman

empiris tetap memiliki tempat, tetapi hanya berfungsi sebagai penguat atau ilustrasi dari kebenaran yang sesungguhnya dicapai melalui akal. Keyakinan semacam ini tampak jelas dalam pemikiran tiga tokoh utama rasionalisme, yaitu Descartes, Spinoza dan Leibniz yang merumuskan fondasi rasionalisme ke dalam tiga prinsip pokok, yaitu

- a. Prinsip pertama menekankan bahwa sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui pemahaman rasional langsung, terutama melalui kemampuan akal dalam menarik kesimpulan logis;
- b. Prinsip kedua berkaitan dengan gagasan bahwa manusia memiliki pengetahuan bawaan. Dalam kerangka rasionalisme, pikiran manusia tidak dimulai dari kehampaan total. Leibniz menolak anggapan bahwa pikiran adalah “kertas kosong” dan menegaskan bahwa terdapat kemampuan dasar dalam diri manusia yang memungkinkan pengenalan terhadap ide-ide universal. Melalui pengetahuan bawaan ini, manusia dapat memahami konsep-konsep pokok seperti identitas, kausalitas, maupun infinitas, yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pengalaman empiris (Linsky, 2021).
- c. Prinsip ketiga menyempurnakan dua prinsip sebelumnya dengan menegaskan bahwa sebagian konsep fundamental tidak berasal dari pengalaman empiris. Rasionalisme memandang bahwa akal memiliki kemampuan untuk membentuk sejumlah konsep universal secara mandiri.

## 2. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Filsafat Rasionalisme

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam perspektif rasionalisme berangkat dari pandangan bahwa kualitas kewarganegaraan tidak dapat dibentuk tanpa mengembangkan kemampuan bernalar. Tradisi rasionalisme menempatkan akal sebagai sumber penilaian yang paling dapat diandalkan, sehingga warga negara ideal bukan hanya memahami aturan, tetapi juga mampu menelusuri alasan moral dan rasional yang menjadi dasar keberlakuan aturan tersebut. Dengan demikian, PKn tidak dipahami sebagai sarana untuk menanamkan doktrin kewargaan, melainkan sebagai ruang pendidikan yang memungkinkan peserta didik memikirkan secara kritis hubungan antara individu, komunitas dan negara. Pendekatan ini juga menuntut peserta didik menimbang argumen moral di balik hak dan kewajiban kewargaan (Banks, 2008; Siegel, 1988).

Dari sisi epistemologis, rasionalisme memberi landasan bagi PKn untuk mengasah kemampuan analitis dalam memahami konsep-konsep abstrak seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan dan demokrasi. Konsep-konsep tersebut tidak cukup dipahami sebagai definisi normatif, tetapi memerlukan proses refleksi, pengujian argumen dan klarifikasi makna melalui dialog kritis. Penelitian mengenai pendidikan kewargaan menegaskan bahwa kemampuan mengolah konsep-konsep normatif ini secara rasional merupakan syarat bagi tumbuhnya warga negara reflektif yang dapat menilai kebijakan dan praktik politik berdasarkan argumentasi yang matang, bukan reaksi emosional semata (DeJaeghere, 2009; Johnson & Morris, 2010).

Pada dimensi etika, rasionalisme memperkuat posisi PKn sebagai ajang untuk mengembangkan etika publik yang bertumpu pada penalaran moral, bukan pada kepatuhan yang bersifat tradisional atau otoritatif. Melalui perspektif ini, keputusan etis dalam kehidupan publik dinilai sah apabila dapat dipertahankan melalui alasan yang terbuka untuk diuji secara rasional oleh orang lain. Di dalam teori tindakan komunikatif, tindakan hanya dianggap sah secara normatif bila ia dapat dibenarkan melalui diskursus yang rasional dan bebas dominasi di antara para peserta dialog. Dengan orientasi seperti ini, PKn diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu menimbang isu publik berdasarkan argumen, bukti dan prinsip keadilan, bukan sekadar mengikuti aturan secara formal.

Selain itu, pendekatan rasionalis juga menekankan pentingnya kemandirian intelektual dalam pembentukan karakter warga negara. Otonomi berpikir merupakan salah satu tujuan utama pendidikan yang berlandaskan rasionalitas, karena individu diharapkan mampu menilai kebenaran klaim, menghindari manipulasi, serta membuat keputusan dengan alasan yang bertanggung jawab. Dalam wacana filsafat pendidikan, kemampuan berpikir kritis tidak hanya dilihat sebagai kompetensi kognitif, tetapi juga sebagai unsur pembentuk kepribadian intelektual yang terbuka terhadap kritik, kesalahan dan bukti baru (Bialystok, 2021; Siegel, 1980, 1988). Perspektif ini sangat penting dalam PKn, karena demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang mampu menimbang keputusan politik secara rasional, bukan berdasarkan loyalitas emosional atau fanatisme kelompok.

Rasionalisme juga memperkuat dimensi deliberatif dalam PKn, mengingat praktik demokrasi kontemporer semakin bergantung pada kemampuan warga untuk terlibat dalam proses pertukaran alasan secara terbuka dan setara. Perspektif ini selaras dengan gagasan rasionalitas komunikatif yang menilai bahwa legitimasi keputusan publik terletak pada kualitas diskursus yang bebas dari manipulasi dan tekanan struktural (Gaspar, 1999; Habermas, 1984). Hal ini menuntut PKn menempatkan kegiatan berdialog, menyusun argumen dan mengkritisi kebijakan sebagai inti pembelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya menguasai isi konstitusi, tetapi juga memahami dan mempraktikkan nilai-nilai deliberatif yang menopang demokrasi.

Dalam lanskap sosial yang ditandai oleh derasnya arus informasi dan fenomena post-truth, rasionalisme memberikan dasar filosofis bagi PKn untuk berfungsi sebagai benteng terhadap disinformasi dan narasi ekstrem. Sejumlah studi menegaskan bahwa penguatan kemampuan berpikir kritis dan literasi informasi berperan sebagai penangkal efektif terhadap pesan-pesan manipulatif dan anti-demokratis yang menyebar di ruang publik (Bialystok, 2021)). Dengan orientasi ini, PKn tidak hanya bertugas meningkatkan pengetahuan tentang kewargaan, tetapi juga membangun disposisi kritis yang memungkinkan warga negara mampu memilah informasi, mengenali bias dan menolak narasi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan maupun prinsip konstitusional.

Secara keseluruhan, hakikat PKn dari perspektif rasionalisme adalah menanamkan kemampuan berpikir kritis, kedewasaan etis, otonomi intelektual, serta kecakapan deliberatif. Kerangka rasionalisme memberikan landasan

filosofis yang mendorong PKn bergerak melampaui pembelajaran normatif-deskriptif menuju pendidikan kewargaan yang reflektif, dialogis dan transformatif sejalan dengan tuntutan masyarakat demokratis yang terus berkembang.

#### D. Simpulan

Kajian mengenai filsafat rasionalisme menunjukkan bahwa aliran ini menempatkan akal sebagai sumber utama pengetahuan dan dasar pembentukan pemikiran kritis. Pemikiran para tokoh seperti Descartes, Spinoza dan Leibniz menguatkan pandangan bahwa kemampuan bernalar merupakan fondasi untuk memahami realitas secara sistematis, logis, dan konsisten.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, rasionalisme memberikan landasan penting bagi pengembangan warga negara yang kritis dan beretika. Rasionalitas membantu peserta didik memahami konsep-konsep kewargaan secara mendalam, menilai persoalan publik berdasarkan argumentasi yang sah, serta membangun etika kewargaan melalui pertimbangan moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada rasionalisme mampu membentuk warga negara yang tidak hanya menaati hukum, tetapi juga memahami alasan dan nilai di balik ketentuan tersebut.

Dengan demikian, rasionalisme berperan sebagai dasar filosofis yang memperkuat tujuan PKn dalam menumbuhkan warga negara yang otonom, reflektif, rasional dan bertanggung jawab, yang mampu menghadapi tantangan kehidupan demokrasi modern secara kritis dan etis.

Berdasarkan kajian mengenai filsafat rasionalisme dan relevansinya terhadap Pendidikan Kewarganegaraan, pembelajaran PKn perlu diarahkan untuk

memperkuat kemampuan bernalar kritis, literasi informasi, dan pemahaman etika publik. Peserta didik tidak cukup hanya menghafal norma dan aturan, tetapi perlu dibimbing untuk memahami alasan moral dan rasional yang melandasi hak dan kewajiban kewargaan. Penguatan pembelajaran berbasis argumentasi, dialog kritis, analisis konsep-konsep abstrak seperti keadilan dan kebebasan, serta kemampuan mengevaluasi klaim pengetahuan menjadi langkah penting dalam membentuk warga negara yang mampu berpikir reflektif, objektif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

Selain itu, PKn perlu memperluas praktik pedagogis yang bersifat deliberatif dan mendorong otonomi intelektual peserta didik. Guru harus dibekali dengan kompetensi pedagogis yang mampu menstimulasi penalaran rasional, memfasilitasi diskusi terbuka, serta memperkuat kemampuan peserta didik menghadapi disinformasi dan fenomena post-truth. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip rasionalisme, PKn dapat berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang matang secara etis, kritis secara epistemik, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial.

#### Daftar Pustaka

- Banks, J. A. (2008). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. Jossey-Bass.
- Bialystok, L. (2021). Post-truth and critical thinking for citizenship. *Theory and Research in Education*, 19(1), 5–22. <https://doi.org/10.1177/1477878521992080>
- DeJaeghere, J. (2009). Critical citizenship education for multicultural societies. *Inter-American Journal of Education for Democracy*, 2(2), 192–207.
- Dreyfus, H. L., and Rabinow, P. (2021). *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*. University of Chicago Press.

- Gaspar, P. (1999). Habermas and political theory. *Philosophy & Social Criticism*, 25(2), 1–16.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society* (Vol. 1). Beacon Press.
- Habermas, J. (2019). *Knowledge and Human Interests*. Polity Press.
- Hatfield, G. (2022). *Routledge Philosophy Guidebook to Descartes and the Meditations* (2nd ed.). Routledge.
- Horvath, J. E., Fernandes, R. R., and Idiart, T. E. (2023). *On the ontological ambiguity of Physics facing Reality*. <https://doi.org/10.1002/asna.20220122>
- Johnson, L., and Morris, P. (2010). Towards a framework for critical citizenship education. *Curriculum Journal*, 21(1), 77–96. <https://doi.org/10.1080/09585170903560444>
- Kretzmann, N., and Stump, E. (2018). *The Cambridge Companion to Medieval Philosophy*. Cambridge University Press.
- Linsky, B. (2021). *Leibniz's Metaphysics: A Historical and Philosophical Study*. Oxford University Press.
- Muhammad Bahar, H., and Teng, A. (2016). *RASIONALIS DAN RASIONALISME DALAM PERSPEKTIF SEJARAH*. Christian Wolff.
- Shields, C. (2020). *Aristotle*. Routledge.
- Siegel, H. (1988). *Educating Reason: Rationality, Critical Thinking, and Education*. Routledge.